

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah yang dihadapi beberapa negara berkembang dewasa ini adalah mengurangi jumlah kemiskinan dengan menggunakan berbagai cara baik melalui peningkatan infrastruktur ekonomi seperti membangun jalan, jembatan, pasar, serta sarana lain, maupun membangun derajat dan partisipasi masyarakat melalui peningkatan pendidikan maupun kesehatan. Namun demikian kendala utama yang dihadapi hampir semuanya sama, yang umumnya bersumber pada permasalahan kependudukan. Mulai dari masih tingginya angka kematian bayi, dan ibu melahirkan, rendahnya kesadaran masyarakat tentang hak-hak reproduksi, serta masih cukup tingginya laju pertumbuhan penduduk, yang tidak sebanding dengan daya dukung lingkungan.

Keprihatinan akan permasalahan kependudukan melahirkan sebuah konsep pembangunan berwawasan kependudukan, atau konsep pembangunan yang berkelanjutan. Dari sini pula lahirlah kesadaran dunia untuk mengurai masalah kemiskinan dan keterbelakangan melalui pendekatan kependudukan. Langkah pertama dan merupakan strategi yang monumental adalah kesadaran lebih dari 120 pemerintah/negara yang berjanji melalui konferensi internasional tentang pembangunan dan kependudukan (ICPD) di Cairo pada tahun 1994 untuk bersama-sama menyediakan pelayanan kesehatan reproduksi bagi semua orang tanpa diskriminasi "Secepat mungkin paling lambat tahun 2015".

Langkah besar ini dilanjutkan dengan *Millenium Development Summit* (MDS) pada bulan September 2000 di New York (Amerika Serikat) dengan

kesepakatan yang dikenal dengan *Millenium Development Goals* (MDGs) yang menegaskan tentang komitmennya untuk :

1. Penghapusan kemiskinan dan kelaparan (*eradicating extreme poverty and hunger*).
2. Mencapai pendidikan dasar yang universal (*achieving iniversal basic education*).
3. Mempromosikan kesehatan gender dan pemberdayaan perempuan (*promoting gender equality and empowering women*).
4. Mengurangi jumlah kematian anak (*reducing child mortality*).
5. Meningkatkan kesehatan ibu (*improving maternal mortality*).
6. Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit lain (*Combating HIV/AIDS, malaria and other deseases*).
7. Menjamin kelestarian lingkungan hidup (*ensuring environmental sustainability*).
8. Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan (*developing a global partnership for development*).¹

Masalah kependudukan juga tentunya dialami oleh Indonesia yang juga merupakan salah satu negara berkembang saat ini. Kondisi kependudukan Indonesia saat ini memang sangat memprihatinkan. Secara kuantitas, penduduk Indonesia masih besar jumlahnya, yaitu 237,6 juta jiwa dan merupakan terbesar keempat di dunia setelah Cina, India dan Amerika Serikat.

Terkait dengan hal ini, keberhasilan program KB Nasional yang dilaksanakan Indonesia selama lima tahun terakhir selalu dipertanyakan akhir-

¹ BKKBN- 2004. *Solusi bagi Pembangunan Bangsa,Info Demografi, Wahana Peningkatan Pengetahuan Kependudukan* Jakarta. Hal 3

akhir ini, apakah telah berhasil menurunkan angka kelahiran sehingga mampu menghambat laju pertumbuhan penduduk (LPP) periode 2000-2010, mengingat hasil sensus penduduk tahun 2010 jumlah penduduk Indonesia mencapai 237,6 juta jiwa dengan LPP 1,49 % telah melampaui proyeksi penduduk pada tahun 2010 sebesar 234,2 juta jiwa.²

Sementara itu, dalam aspek kualitas, Indonesia masih memiliki 31,02 juta jiwa (13,3%) penduduk miskin dengan persebaran penduduk miskin di pedesaan masih menempati porsi terbanyak yakni 18,97 juta orang, sedangkan di kota 11,05 juta orang dimana 60% penduduk hanya tamat SD atau lebih rendah, angka kematian ibu hamil, melahirkan dan nifas saat ini 228/100.000 kelahiran hidup, angka kematian bayi 34/1000 kelahiran hidup.

AKI dan AKB di Indonesia merupakan angka tertinggi di ASEAN. Dengan tingkat pendidikan, kesehatan dan daya beli penduduk yang masih rendah tersebut maka angka Indek Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia terpuruk pada posisi 108 dari 187 negara. Serta berada pada peringkat ke 7 dari 10 negara ASEAN.

Permasalahan tersebut memerlukan penyelesaian secara bersama antara pemerintah dan masyarakat karena apabila pembangunan kependudukan dan program KB tidak segera mendapatkan perhatian dari para pengambil kebijakan, maka penambahan penduduk sebesar 3,5 juta per tahun akan menjadi beban bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Hal ini akan berdampak kepada aspek pembangunan lainnya seperti: penyediaan pangan, tempat pemukiman,

² BPS 2010

kesehatan, pendidikan, kebutuhan air bersih, listrik, lapangan pekerjaan dan lain-lainnya.

Sebagai salah satu indikator negara berkembang, kemiskinan di Indonesia merupakan salah satu masalah yang sudah sangat mengakar dan untuk menanggulangnya membutuhkan waktu yang sangat lama, bahkan pada tahun 2010 jumlah penduduk miskin di Indonesia berjumlah 31,02 juta orang. Dari angka tersebut, penduduk miskin di pedesaan masih menempati porsi terbanyak yakni 18,97 juta orang, sedangkan di kota 11,05 juta orang.³

Oleh karena itu, untuk mempercepat proses perbaikan kesejahteraan masyarakat pada dasarnya pemerintah pusat, daerah dan desa dapat bekerja sama dalam membuat dan melaksanakan program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan baik agar efek dari program tersebut dapat dirasakan untuk jangka pendek dan jangka panjang. Namun dalam prosesnya, selain pemerintah yang peduli dan kebijakan yang menyentuh kepentingan masyarakat diperlukan pula inisiatif dan kesadaran dari bawah yaitu oleh masyarakat daerah tersebut sendiri.

Oleh karena itu, sebuah langkah kongkrit yang awalnya didalangi oleh Yayasan Damandiri atas respon dari jawaban langsung terhadap anjuran Presiden RI, Dr. Susilo Bambang Yudhoyono, yang disampaikan pada saat menutup Konferensi Nasional Pembangunan Manusia pada tahun 2006 yang menghimbau agar semua pihak memberikan perhatian dan dukungan terhadap pencapaian sasaran dan target-target MDGs, termasuk mengendalikan pertumbuhan penduduk yang makin meningkat karena penanganan program KB yang mengendor dan

³ Ibid

situasi kemelut dunia yang belum mereda yang bisa menambah tingkat kemiskinan yang belum dapat diatasi meningkat kembali.⁴

Program ini sejalan dengan UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial terutama pasal 12 tentang Pemberdayaan Sosial dan juga Inpres Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pembangunan yang Berkeadilan yang menginstruksikan agar para menteri-menteri hingga jajaran pemerintahan yang paling bawah agar dapat melaksanakan program-program yang pro rakyat, berkeadilan dan juga mencapai target dari MDGs, yang mana fokus dari kedua landasan hukum ini menjadi inti kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam tubuh Posdaya.

Program ini diawali dengan mengajak dan merangkul berbagai kalangan masyarakat dan pemerintah daerah mengembangkan jaringan pelaksana pada tingkat pedesaan dan pedukuhan dalam bentuk Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya). Posdaya dibentuk, dibina dan dikembangkan sebagai lembaga masyarakat berupa forum silaturahmi, advokasi, komunikasi, edukasi dan wadah kegiatan penguatan fungsi-fungsi keluarga secara terpadu yang dibentuk dan dilaksanakan dari, oleh dan untuk keluarga dan masyarakatnya.

Dan program ini pun juga diterapkan di Kabupaten Bantul yang ikut menggalakkan program Posdaya sejak tahun 2007 dan saat ini sudah mencapai 933 dusun. Program Posdaya di Kabupaten Bantul dilaksanakan atas Keputusan Bupati Bantul nomor 19A Tentang Pembentukan Tim Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya) Kabupaten Bantul.

⁴ Prof. Dr. Haryono Suyono.2009. *Pedoman Pelaksanaan KKN Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya)*. Cita Kharisma Bunda. Depok.

Program Posdaya diselenggarakan di desa-desa, dusun-dusun di Kabupaten Bantul mempunyai dampak positif dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya adalah mensukseskan program Keluarga Bencana (KB) untuk menekan laju pertumbuhan penduduk. Bahkan menurut Kepala BKK, PP dan KB Drs.Joko Sulasno Nimpuno, di tahun 2010 laju pertumbuhan penduduk Bantul sudah di angka 0,78%, ini membuktikan bahwa program KB yang selalu digalakkan sudah bisa menekan laju pertumbuhan penduduk. Peserta KB sudah mencapai 135% di tahun 2010.⁵ Hal itu menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat Bantul untuk ber-KB sudah besar.

Di Kecamatan Kasihan sendiri yang merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Bantul, tingkat laju pertumbuhan penduduknya masih sangat tinggi yaitu 2,47% yang merupakan kecamatan dengan angka laju pertumbuhan tertinggi kedua di Kabupaten Bantul setelah Kecamatan Banguntapan yang angka laju pertumbuhan penduduknya sebanyak 3,10%.⁶

Desa Bangunjiwo merupakan salah satu desa di Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul. Desa ini terdiri dari 19 pedukuhan (kampung) dan 135 RT dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun 2010 sebanyak 24.303 dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 7.403 KK.⁷

Desa ini banyak memiliki potensi wisata yang cukup berkembang dan terkenal di Jogjakarta, antara lain : dusun (kampung) kerajinan gerabah atau keramik yang sangat terkenal yakni Kasongan. Selain itu masih terdapat kerajinan lain seperti batu di Lemahdadi, wayang kulit di Gendeng, kerajinan bambu di

⁵ <http://bantulkab.go.id/berita/1018.html>, Akses 24 Oktober 2011

⁶ BPS, Bantul Dalam Angka 2011. Hal.131

⁷ Kecamatan Kasihan Dalam Angka.BPS, 2010

Jipangan, desa wisata di Sribitan, tanaman hias di Kalangan dan aneka kerajinan bunga kering yang dikerjakan di berbagai desa.

Namun sangat disayangkan dari keberhasilan desa tersebut mengembangkan potensi wisatanya dari 4.466 KK masih terdapat keluarga miskin sebanyak 1.192 KK, penerima beras miskin 1.204 KK dan penerima dana SLT sebanyak 1.393 KK serta penerima pinjaman dana sebesar Rp 1 juta sebanyak 135 KK.⁸

Di Desa Bangunjiwo saat ini juga telah mendukung dan telah ikut andil dalam pelaksanaan program Posdaya terbukti dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Lurah Desa Bangunjiwo Nomor 05 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya) Tingkat Pedukuhan Se-Desa Bangunjiwo. Pedukuhan Gendeng dan Pedukuhan Lemahdadi merupakan dua diantara 19 pedukuhan yang ada di Desa Bangunjiwo yang memiliki Posdaya, di pedukuhan ini program pemberdayaan masyarakat dilakukan secara bersama-sama oleh masyarakat yang didalamnya terdapat banyak program-program yang berjalan baik di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Pelaksanaan program Posdaya sendiri manfaatnya sudah dirasakan oleh masyarakat di pedukuhan tersebut karena program-program yang dilaksanakan merupakan program dalam bentuk bottom up program.

Berdasar pada uraian dalam latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut untuk menemukan aspek-aspek yang terkait dengan program Posdaya tersebut dalam judul: **“Analisis Implementasi**

⁸ <http://bangunjiwoproject.wordpress.com/2010/11/03/hello-world/>, Akses 24 Oktober 2011

Program Posdaya di Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul (Studi Kasus di Pedukuhan Lemahdadi dan Pedukuhan Gendeng)”.

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah sangat penting dalam suatu penelitian agar diketahui arah jalan penelitian tersebut. Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1. Bagaimana implementasi program Posdaya di Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul khususnya di Pedukuhan Lemahdadi dan Pedukuhan Gendeng?*
- 2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi program Posdaya di Pedukuhan Lemahdadi dan Pedukuhan Gendeng?*

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi program Posdaya di Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program Posdaya di Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara langsung atau tidak bagi kepastakaan Jurusan Ilmu Pemerintahan dan bagi kalangan penulis lainnya yang tertarik untuk mengeksplorasi kembali kajian tentang implementasi program pembangunan desa di daerah lain.

2. Manfaat Praktis

- a. Mengetahui keefektifan implementasi program Posdaya di Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul
- b. Memberikan masukan bagi pemerintah Kabupaten Bantul khususnya aparat desa Bangunjiwo agar dapat lebih baik lagi dalam melaksanakan program Posdaya maupun program-program kesejahteraan masyarakat lainnya.
- c. Sebagai bahan referensi bagi pemerintah daerah lain untuk dapat lebih tergerak untuk membuat kebijakan dan program-program yang dapat lebih mensejahterakan masyarakat.

E. Kerangka Dasar Teori

Sebagai titik tolak atau landasan berpikir dalam menyoroiti atau memecahkan masalah, maka perlu adanya pedoman teoritis yang dapat membantu. Seperti yang dikatakan oleh Hoy & Miskel, teori adalah seperangkat konsep, asumsi dan generalisasi yang dapat digunakan untuk mengungkapkan dan menjelaskan perilaku dalam berbagai organisasi.⁹

Begitu pula yang dikatakan oleh Sugiono bahwa landasan teori perlu ditegaskan agar penelitian mempunyai dasar yang kokoh dan bukan sekedar perbuatan yang sifatnya coba-coba (*trial and error*).¹⁰ Sebelum melakukan penelitian yang lebih lanjut, seorang peneliti perlu menyusun suatu kerangka teori

⁹ Sugiono. 2004. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. Hal. 55

¹⁰ Ibid

sebagai landasan berfikir untuk menggambarkan dari sudut mana peneliti menyoroiti masalah yang dipilihnya.

Sehubungan dengan itu, maka berikut akan dijelaskan beberapa pengertian yang disertai pendapat para ahli yang memiliki kaitan dengan pokok bahasan serta hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan penelitian ini yang meliputi konsep kebijakan.

1. Implementasi

Implementasi merupakan tahapan yang menghubungkan antara rencana dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, implementasi merupakan proses penerjemahan pernyataan kebijakan (*policy statement*) ke dalam aksi kebijakan (*policy action*). Sedangkan Ripley¹¹ mengartikan implementasi sebagai proses yang terjadi setelah sebuah produk hukum dikeluarkan yang memberikan otorisasi terhadap suatu kebijakan, program atau output tertentu. Dengan demikian implementasi merujuk pada serangkaian aktivitas yang dijalankan oleh pemerintah yang mengikuti arahan tertentu tentang tujuan dan hasil yang diharapkan. Implementasi meliputi tindakan-tindakan (dan non-tindakan) oleh berbagai aktor, terutama birokrasi, yang sengaja didesain untuk menghasilkan efek tertentu demi tercapainya suatu tujuan.

Goggin¹² menggunakan pendekatan komunikasi dalam mengartikan implementasi yang diartikannya sebagai suatu proses, serangkaian keputusan dan tindakan negara yang diarahkan untuk menjalankan suatu mandat yang telah

¹¹ Randall B. Ripley, 1985, *Political Analysis in Political Sciences*, Chicago: Nelson Hill Inc, hal. 30

¹² Goggin, Malcomm L., 1991, *Implementation Theory and Practice : Towards a Third Generation*, Scott, Foresman/Little, Brown Higher Education. Glenview Illinois. Hal 36

ditetapkan. Implementasi sering disejajarkan dengan ketaatan (*compliance*) negara, atau suatu pemenuhan tuntutan prosedur hukum sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Grindle menyatakan bahwa implementasi merupakan upaya menerjemahkan kebijakan publik yang merupakan pernyataan luas tentang maksud, tujuan dan cara mencapai tujuan ke dalam berbagai program aksi untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan dalam suatu kebijakan. Dengan demikian implementasi berhubungan dengan penciptaan "*policy delivery system*" yang menghubungkan tujuan kebijakan dengan *output* atau *outcomes* tertentu.¹³

2. Kebijakan/Program

Istilah kebijakan seringkali penggunaannya dipertukarkan dengan istilah lain seperti tujuan (*goal*) program, keputusan undang-undang, ketentuan-ketentuan, usulan-usulan, dan rancangan-rancangan besar. Bagi para pembuat kebijakan istilah-istilah tersebut tidak akan membuat masalah apapun karena mereka menggunakan referensi yang sama.

Thomas R. Dye dalam buku Riant Nugroho D mendefinisikan kebijakan publik sebagai segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan hasil yang membuat sebuah kehidupan bersama tampil berbeda.¹⁴

¹³Merille S. Grindle, 1980, *Politics and Policy Implementations in the Third World*, New Jersey :Princeton University Press. Hal.6

¹⁴ Riant Nugroho D. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta :Elex Media Kompetindo Gramedia. Hal 3

Sementara Harold Laswell dan Abraham Kaplan mendefinisikan kebijakan sebagai suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu, nilai-nilai tertentu dan praktek-praktek tertentu.¹⁵

Sedangkan Menurut Carl Frederick¹⁶, kebijakan merupakan suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau sasaran yang diinginkan.

Islami memberikan pendapat bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu dari kepentingan seluruh masyarakat. Implikasi pengertian tersebut adalah :

- a. Kebijakan publik bentuk perdananya adalah penetapan tindakan-tindakan pemerintah
- b. Kebijakan publik tidak cukup hanya dinyatakan tapi juga dilaksanakan dalam bentuk nyata
- c. Setiap kebijakan dilandasi dengan maksud dan tujuan tertentu
- d. Kebijakan publik pada hakekatnya untuk kepentingan masyarakat¹⁷

Kebijakan publik adalah sebuah fakta strategis daripada fakta politis ataupun fakta teknis. Sebagai sebuah strategi, dalam kebijakan publik sudah

¹⁵ H.A.R Tilaar dan Riant Nugroho.2008.*Kebijakan Pendidikan*. Yogyakarta.Pustaka Pelajar. Hal.183

¹⁶ Solichin Abdul Wahab. 1997. *Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara Edisi Kedua Cetakan Pertama*. Jakarta. Bumi aksara hal.3

¹⁷ M.Irfan Islamy, 2004, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Jakarta, PT. Bumi Aksara, 2004 hal.20

terangkum preferensi-preferensi politis dari para aktor yang terlibat dalam proses kebijakan, khususnya pada proses perumusan. Sebagai sebuah strategi, kebijakan publik tidak saja bersifat positif, namun juga negatif, dalam arti pilihan keputusan selalu bersifat menerima salah satu dan menolak yang lain.

Meskipun terdapat ruang bagi *win-win solution* dimana sebuah tuntutan dapat diakomodasi, namun pada akhirnya ruang bagi *win-win solution* sangat terbatas, sehingga kebijakan publik lebih banyak pada ranah *zero-sum-game*, yaitu menerima yang ini, dan menolak yang lain.

Menurut pandangan Thomas R. Dye, tahapan-tahapan kebijakan publik sebagai berikut :

a. Identifikasi masalah kebijakan (*identification of policy problem*)

Identifikasi masalah kebijakan dapat dilakukan melalui identifikasi apa yang menjadi tuntutan (*demands*) atas tindakan pemerintah.

b. Penyusunan agenda (*agenda setting*)

Penyusunan agenda merupakan aktivitas memfokuskan perhatian pada pejabat publik dan media massa atas keputusan apa yang akan diputuskan terhadap masalah publik tertentu.

c. Perumusan kebijakan (*policy formulation*)

Perumusan kebijakan (*formulation*) merupakan tahapan pengusulan rumusan kebijakan melalui inisiasi dan penyusunan usulan kebijakan melalui

organisasi perencanaan kebijakan, kelompok kepentingan, birokrasi pemerintah, presiden, dan lembaga legislatif.

d. Pengesahan kebijakan (*legitimizing of policies*)

Pengesahan kebijakan melalui tindakan politik oleh partai politik, kelompok penekan, presiden dan kongres.

e. Implementasi kebijakan (*policy implementation*)

Implementasi kebijakan dilakukan melalui birokrasi, anggaran publik, dan aktivitas agen eksekutif yang terorganisasi.

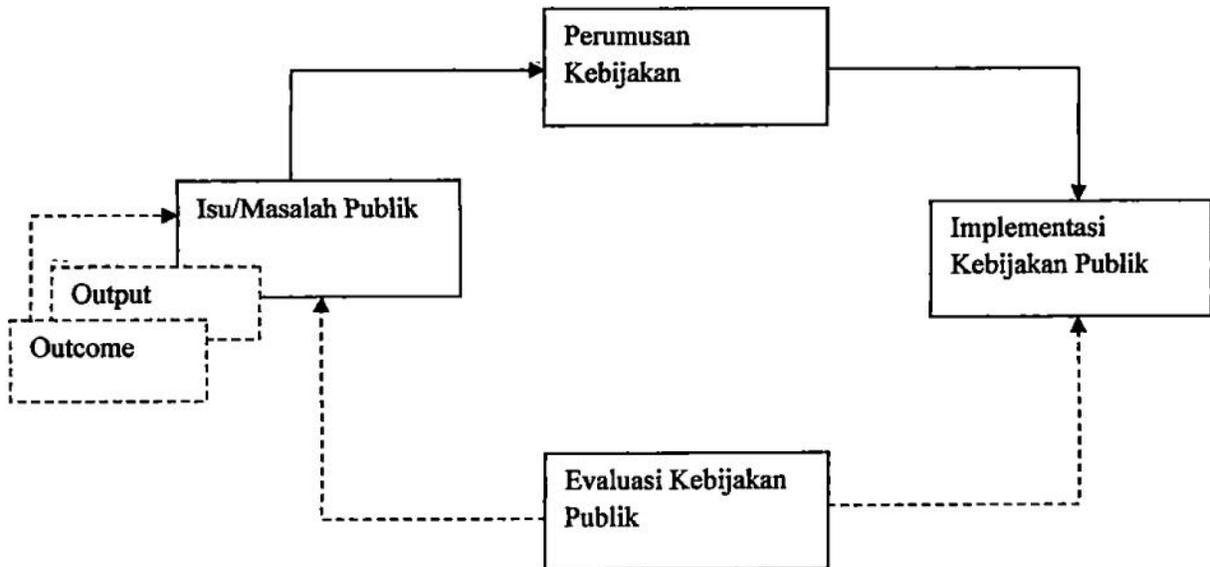
f. Evaluasi kebijakan (*policy evaluation*)

Evaluasi kebijakan dilakukan oleh lembaga pemerintah sendiri, konsultan di luar pemerintah, pers, dan masyarakat (publik).¹⁸

Tidak mudah memang untuk membuat sebuah kebijakan publik yang baik dan benar, namun itu juga bukanlah hal yang mustahil, Riant Nugroho D¹⁹ memberikan sebuah cara yang bersifat ideal-teoritis-metodologis tentang bagaimana siklus skematik dari kebijakan publik :

¹⁸ Dr. Joko Widodo, M.S. 2008. *Analisis Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang. Bayumedia Publishing. Hal 17

¹⁹ Riant Nugroho D. *Op.Cit* Hal.73



Gambar 1.1 Siklus Kebijakan Publik

Sumber : Riant Nugroho D. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. 2003.

Hal 73

Dari gambar diatas dapat dijelaskan dalam sekuensi sebagai berikut :

1) Terdapat isu atau masalah publik. Disebut isu apabila masalahnya bersifat strategis, yakni bersifat mendasar, menyangkut banyak orang atau bahkan keselamatan bersama, (biasanya) berjangka panjang, tidak bisa diselesaikan oleh orang-orang, dan memang harus diselesaikan. Isu ini diangkat sebagai agenda politik untuk diselesaikan.

2) Isu ini kemudian menggerakkan pemerintah untuk merumuskan kebijakan publik dalam rangka menyelesaikan masalah tersebut. Rumusan kebijakan ini akan menjadi hukum bagi seluruh negara dan warganya termasuk pimpinan negara.

3) Setelah dirumuskan kemudian kebijakan publik ini dilaksanakan baik oleh pemerintah, masyarakat, atau pemerintah bersama-sama dengan masyarakat.

4) Namun di dalam proses perumusan, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan, diperlukan tindakan evaluasi sebagai sebuah siklus baru sebagai penilaian apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan dengan baik dan benar dan diimplementasikan dengan baik dan benar pula.

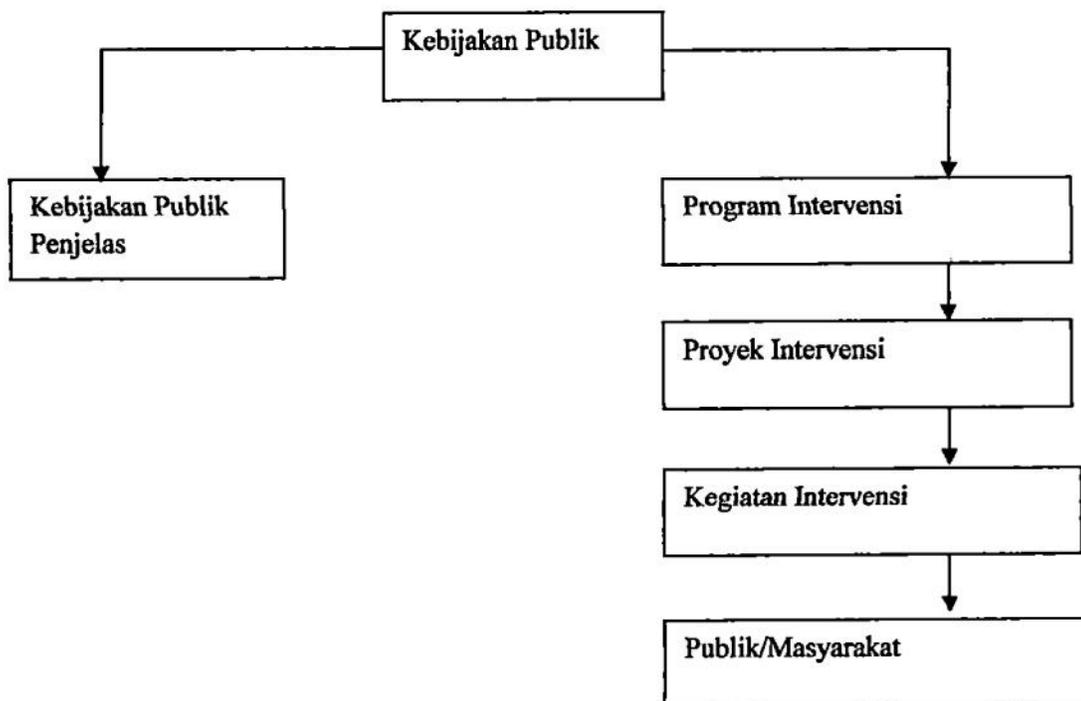
5) Implementasi kebijakan bermuara kepada output yang dapat berupa kebijakan itu sendiri maupun manfaat langsung yang dapat dirasakan oleh pemanfaat.

6) Di dalam jangka panjang kebijakan tersebut menghasilkan outcome dalam bentuk dampak kebijakan yang diharapkan semakin meningkatkan tujuan yang hendak dicapai dengan kebijakan tersebut.

3. Implementasi Kebijakan / Program

Implementasi kebijakan merupakan salah satu tahapan dari proses kebijakan publik (*public policy process*), sekaligus sebagai salah satu tahapan yang sangat *crucial*. Bersifat *crucial* karena bagaimanapun baiknya suatu kebijakan, kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan dengan baik dalam implementasinya, maka tujuan kebijakan tidak akan bisa terwujud. Demikian pula sebaliknya, bagaimanapun baiknya persiapan dan perencanaan implementasi kebijakan, kalau tidak dirumuskan dengan baik maka tujuan kebijakan juga tidak akan bisa diwujudkan. Dengan demikian, jika menghendaki tujuan kebijakan dapat dicapai dengan baik, maka pada setiap tahapan kebijakan, baik pada tahapan perumusan atau pembuatan kebijakan, dan juga tahap implementasi harus dipersiapkan dan direncanakan dengan baik.

Menurut Riant Nugroho D,²⁰ implementasi kebijakan adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan maka ada dua langkah pilihan yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan, derivate atau turunan dari kebijakan tersebut. Yang secara umum digambarkan seperti digambarkan pada skema berikut ini :



Gambar 1.2 Skema Implementasi Kebijakan

Sumber : Riant Nugroho D. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. 2003. Hal 73

Pelaksanaan atau implementasi kebijakan di dalam konteks manajemen berada di dalam kerangka *organizing-leading-controlling*. Jadi, ketika kebijakan sudah dibuat, maka tugas selanjutnya adalah mengorganisasikan, melaksanakan

²⁰ Riant Nugroho D. *Op.cit*. Hal 3

kepemimpinan untuk memimpin pelaksanaan, dan melakukan pengendalian pelaksanaan tersebut.

Udoji mengatakan bahwa pelaksanaan program dari suatu kebijakan adalah suatu yang penting, bahkan mungkin jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip jika tidak di implementasikan.²¹

Sebagai salah satu kebijakan untuk mengatasi suatu masalah di masyarakat, perlu adanya kegiatan yang dituangkan dalam proyek-proyek. Untuk mewujudkan tujuan tersebut perlu adanya pelaksanaan/ implementasi program-program.

Implementasi program merupakan sub bagian dari implementasi kebijakan, maka implementasi kebijakan merupakan fungsi dari implementasi program yang tergantung pada hasil atau *outcomes*.

Daniel A Mazmanian dan Paul A Sabatier menjelaskan makna implementasi ini dengan menyatakan bahwa memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah sesuatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan²².

Ada beberapa model implementasi kebijakan, salah satunya adalah model yang paling klasik yaitu model yang diperkenalkan oleh Donald Van Meter dan Carl Van Horn yang lebih berpola puncak ke bawah (*top-bottom*) dan bermekanisme paksa daripada mekanisme pasar.²³

²¹ Solichin Abdul Wahab, 1991, *Analisis Kebijaksanaan Negara Suatu Pengantar*. Rineka Cipta Jakarta. hal 45

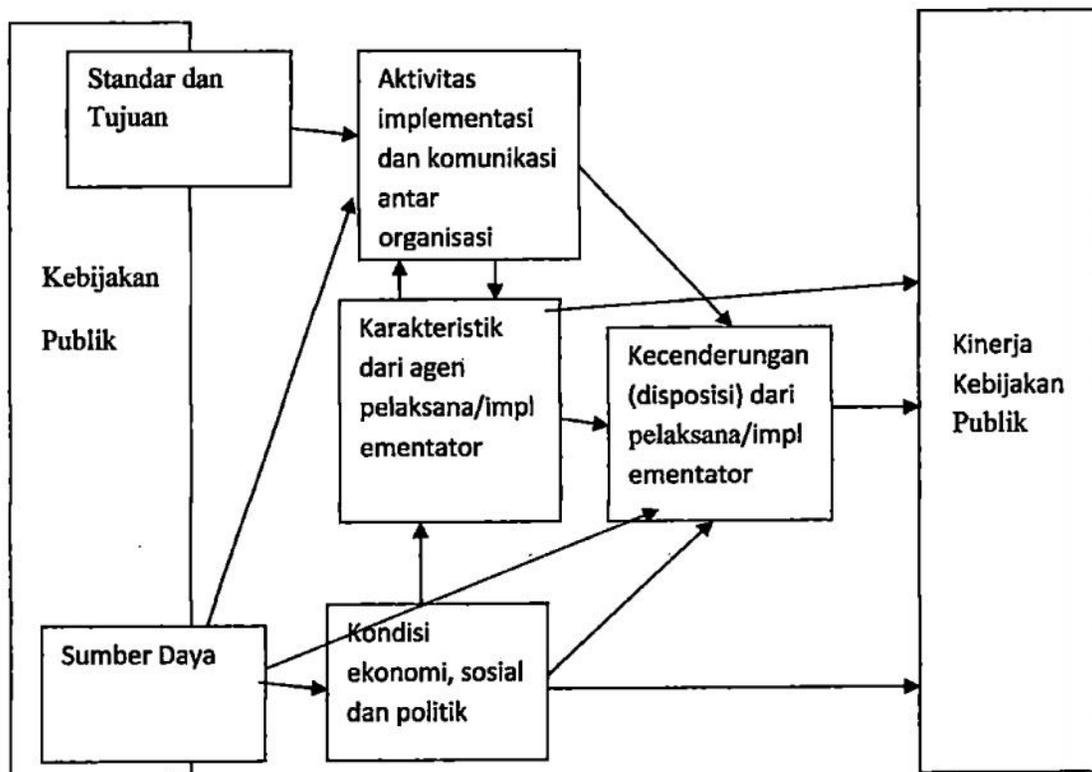
²² Solichin Abdul Wahab. 1997. *Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara Edisi Kedua Cetakan Pertama*. Jakarta. Bumi aksara hal.56

²³ Riant Nugroho D. *Op.cit.* Hal 165

Model ini mengandaikan implementasi kebijakan berjalan secara linear dari kebijakan publik, implementator, dan kinerja kebijakan publik. Beberapa variabel yang dimasukkan sebagai variabel yang mempengaruhi dalam implementasi kebijakan publik antara lain :

1. Aktivitas implementasi dan komunikasi antarorganisasi,
2. Karakteristik dari agen pelaksana/implementator,
3. Kondisi ekonomi, sosial dan politik,
4. Kecenderungan (disposisi) dari pelaksana/implementator.

Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan melalui gambar dibawah ini :



Gambar 1.3 Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Carl Van Horn

Sumber : Riant Nugroho D. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. 2003.

Hal 168

Berbeda dengan model Donald Van Meter dan Carl Van Horn diatas, model yang disusun oleh Richard Elmore, Michael Lipsky dan Benny Hjern dan David O'Porter yang lebih menekankan implementasi kebijakan publik pada pola dari bawah ke atas (*bottom-topper*) dan lebih berada di mekanisme pasar. Model ini dimulai dari mengidentifikasi jaringan aktor yang terlibat di dalam proses pelayanan dan menanyakan kepada mereka tujuan, strategi, aktivitas dan kontak-kontak yang mereka miliki.

Model implementasi ini didasarkan pada jenis kebijakan publik yang mendorong masyarakat untuk mengerjakan sendiri implementasi kebijakannya atau masih melibatkan pejabat pemerintah, namun hanya di tataran bawah. Oleh karena itu, kebijakan yang dibuat harus sesuai dengan harapan, keinginan publik yang menjadi target atau kliennya dan sesuai pula dengan pejabat eselon rendah yang menjadi pelaksananya.

Jika melihat kedua bentuk model implementasi kebijakan diatas, maka dalam penelitian ini model implementasi yang cocok digunakan adalah model implementasi yang kedua yaitu model implementasi yang berpola *bottom-topper*, karena program Posdaya merupakan program yang dikerjakan oleh masyarakat daerah itu sendiri.

Dalam implementasi kebijakan tentu saja akan ada faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam melaksanakan suatu kebijakan atau program, Menurut Edward III ada empat faktor atau variabel yang berpengaruh terhadap

keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan.²⁴ Empat faktor tersebut antara lain:

1. Faktor Komunikasi

Komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy maker*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementators*).

Informasi kebijakan publik perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui, memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah dan kelompok sasaran kebijakan, tapi informasi kebijakan juga harus pula disampaikan pada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan, baik langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan publik agar tujuan kebijakan dapat dicapai secara efektif dan efisien.

2. Sumber Daya (*Resources*)

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kebijakan. Efektifitas pelaksanaan kebijakan sangat tergantung kepada sumber daya manusia yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan.

Sekalipun aturan main pelaksanaan kebijakan jelas dan kebijakan telah ditransformasikan dengan tepat, namun manakala sumber daya manusia terbatas

²⁴ Riant Nugroho D., *Op.Cit.* Hal.96

baik dari jumlah maupun kualitas (keahlian), pelaksanaan kebijakan tidak akan berjalan efektif. Oleh karena itu sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan harus ada ketepatan dan kelayakan antara jumlah staf yang dibutuhkan dan keahlian yang dimiliki sesuai dengan tugas dan pekerjaan yang ditangani.

b. Sumber Daya Anggaran

Terbatasnya sumber daya anggaran (keuangan), akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Selain program tidak dapat dilaksanakan dengan optimal, terbatasnya anggaran menyebabkan disposisi para pelaku kebijakan rendah, bahkan dapat terjadi goal displacement yang dilakukan oleh pelaku kebijakan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan yang telah ditetapkan.

c. Sumber Daya Peralatan

Sumber daya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah, dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan.

Terbatasnya fasilitas dan peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan, menyebabkan gagalnya pelaksanaan kebijakan karena dengan terbatasnya fasilitas sulit untuk mendapatkan informasi yang akurat, tepat, handal, dan dapat dipercaya akan sangat merugikan pelaksanaan akuntabilitas.

d. Sumber Daya Informasi dan Kewenangan

Sumber daya ini merupakan sumber daya yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan. Informasi yang relevan dan cukup tentang berkaitan bagaimana cara mengimplementasikan suatu kebijakan dan juga informasi tentang kerelaan atau kesanggupan dari berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan tersebut. Hal itu dimaksudkan agar para pelaksana tidak akan melakukan suatu kesalahan dalam menginterpretasikan tentang bagaimana cara mengimplementasikan atau melaksanakan kebijakan tersebut. Disamping itu, informasi sangat penting untuk menyadarkan orang-orang yang terlibat dalam implementasi agar diantara mereka mau melaksanakan dan mematuhi apa yang menjadi tugas dan kewajibannya.

Kewenangan juga merupakan sumber daya lain yang mempengaruhi efektifitas pelaksanaan kebijakan. Kewenangan sangat diperlukan, terutama untuk menjamin dan meyakinkan bahwa kebijaksanaan yang akan dilakukan adalah sesuai dengan yang mereka kehendaki.

3. Disposisi

Disposisi merupakan kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Dengan begitu implementasi kebijakan dapat berjalan secara efektif dan efisien para pelaksana harus mengetahui apa yang harus dilakukan dan memiliki kemampuan untuk melakukan kebijakan serta mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Ada tiga elemen respon yang dapat mempengaruhi keinginan dan kemauan untuk melaksanakan suatu kebijakan, antara lain terdiri atas pengetahuan (*cognition*), pemahaman dan pendalaman (*comprehension and understanding*) terhadap kebijakan; arah respon mereka apakah menerima, netral atau menolak (*acceptance, neutrality, and rejection*); intensitas terhadap kebijakan.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang efisien dapat membuat implementasi kebijakan dapat berjalan efektif, karena meskipun sumber-sumber untuk mengimplementasikan suatu kebijakan cukup dan para pelaksana (*implementator*) mengetahui apa dan bagaimana cara melakukannya, implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena adanya ketidak efisien struktur birokrasi.

Struktur birokrasi mencakup aspek-aspek seperti struktur organisasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi yang ada dalam organisasi yang bersangkutan, dan hubungan organisasi dengan organisasi luar dan sebagainya. Oleh karena itu, struktur birokrasi mencakup dimensi fragmentasi (*fragmentation*) dan standar prosedur operasi (*standard operating procedure*) yang akan memudahkan dan menyeragamkan tindakan dari para pelaksana kebijakan dalam melaksanakan apa yang menjadi bidang tugasnya.

4. Program Posdaya

Menurut penjelasan P2SDM LPPM IPB,²⁵ Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya) adalah sebuah gerakan untuk membangkitkan kembali budaya gotong

²⁵ Pudji Muljono, 2011. *1001 Cara Mengenal Posdaya*. PT. Penerbit IPB Press. Bogor. 2011. Hal 5

royong di masyarakat dalam membangun kehidupan berkeluarga, dilakukan secara swadaya dengan harapan masyarakat dapat mandiri.

Sedangkan menurut Yayasan Damandiri, Posdaya merupakan suatu forum silaturahmi, advokasi, komunikasi, informasi, edukasi, sekaligus bisa dikembangkan menjadi wadah koordinasi kegiatan penguatan fungsi-fungsi keluarga secara terpadu.²⁶

Dalam Posdaya sendiri menekankan pada pemberdayaan 8 fungsi keluarga secara terpadu yaitu fungsi agama atau Ketuhanan yang Maha Esa, fungsi budaya, fungsi perlindungan, fungsi reproduksi dan kesehatan, fungsi pendidikan, fungsi ekonomi atau wirausaha, dan fungsi lingkungan.

Tujuan utama program pemberdayaan melalui Posdaya adalah penguatan fungsi-sungsi keluarga dan pencapaian MDGs, utamanya pengentasan kemiskinan, serta memudahkan akses setiap keluarga pada kesempatan wirausaha, pendidikan dan pelatihan, serta pembudayaan pola hidup sehat. Oleh karena itu semua upaya diarahkan pada peningkatan partisipasi seluruh keluarga dan penduduk, utamanya keluarga yang tertinggal.

Melalui dukungan pemberdayaan yang berkelanjutan disertai komitmen yang tinggi dari para pemimpin di segala tingkatan diharapkan masyarakat secara mandiri berani mengembangkan *inisiasi*, yaitu mengawali langkah dan program nyata secara mandiri dengan mengajak dan mendampingi seluruh target keluarga dan penduduk tertinggal memperoleh akses pelayanan paripurna yang dibutuhkannya dengan lebih mudah.

²⁶ Ibid

Di pihak lain keluarga dan penduduk tertinggal diharapkan bekerja keras dan cerdas menjemput pelayanan yang dibutuhkannya melalui fasilitasi oleh pemerintah dalam rangka menyempurnakan kemampuannya melaksanakan delapan fungsi keluarga yang utama untuk membangun seluruh anggotanya. Apabila seluruh keluarga mampu membangun seluruh anggotanya, anak-anaknya dengan baik, maka seluruh anak bangsa dapat dikembangkan menjadi sumber daya manusia yang beriman, cerdas, terampil, serta sanggup membangun negara dan bangsanya dengan baik.

Karena pemberdayaan keluarga bersifat paripurna, maka jaringan Posdaya menjadi penguat jaringan Posyandu yang dibentuk sejak tahun 1983 oleh BKKBN dan Depkes khusus untuk memperluas jangkauan pelayanan KB dan Kesehatan. Jaringan Posdaya menjadi lembaga pemberdayaan keluarga secara paripurna dalam masyarakat, oleh masyarakat dan menjadi milik atau kebanggaan masyarakat. Lembaga ini menjadi sarana dimana anggotanya bersama-sama bertindak sebagai pemberi masukan untuk keluarga yang menjadi anggotanya.

Selain itu, karena upaya pemberdayaan sifatnya menempatkan manusia dan keluarga sebagai titik sentral pemberdayaan, maka keberhasilannya diukur dari tingkat partisipasi keluarga atau penduduk yang ada di sekitar atau menjadi anggota Posdaya di dukuh dan desa yang bersangkutan dan melaksanakan delapan fungsi utamanya, yang tidak lain adalah terjemahan dari target dan sasaran MDGs, tingkat intensitas dan kontinuitas program, jumlah program yang dilaksanakan serta kelengkapan sarana kegiatan Posdaya.²⁷

²⁷ Ibid

Dalam Posdaya, proses pemberdayaan melalui Posdaya mengacu dan menempatkan prioritas yang tinggi pada upaya pengentasan kemiskinan, maka semua keluarga miskin atau tertinggal diusahakan secara sungguh-sungguh untuk ikut dalam setiap kegiatan Posdaya. Lebih utama lagi, karena kemiskinan pada umumnya disebabkan keadaan isteri atau kaum perempuan yang lemah, maka kesertaan kaum perempuan, utamanya dari keluarga muda, dijadikan sasaran yang utama.

Posdaya juga merupakan upaya untuk mewujudkan kepedulian (empati) dan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan keluarga dengan memanfaatkan potensi SDM dan SDA lokal melalui pengembangan kewirausahaan, peningkatan pendidikan dan ketrampilan, kesehatan, serta pemberdayaan lingkungan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya itu dilakukan melalui pembentukan dan pengembangan lembaga Posdaya yang berfungsi sebagai wahana silaturahmi, komunikasi, informasi, edukasi serta partisipasi yang dilakukan secara gotong royong.

Sebagai basis pemetaan perlu ditentukan wilayah cakupan Pos Pemberdayaan keluarga (Posdaya) yang bersangkutan. Wilayah ini bisa sempit, misalnya satu pedukuhan, dan bisa luas atau diperluas di kemudian hari. Untuk melakukan pemetaan perlu dilakukan pendataan seluruh keluarga yang berada dalam cakupan Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya) yang bertanggung jawab di wilayah yang bersangkutan.

Dalam upaya-upaya awal Pengurus Posdaya diharapkan dapat memfokuskan sasaran kegiatannya kepada empat sasaran utama IPM (indeks

pembangunan manusia), yaitu bidang wirasusaha, bidang pendidikan dan ketrampilan, bidang KB dan kesehatan, serta bidang lingkungan.²⁸

Dalam bidang wirausaha, pengembangan pelatihan keluarga muda diharapkan sesuai dengan kebutuhan yang ada di lapangan agar jumlah keluarga yang segera dapat bekerja jumlahnya banyak. Dengan pelatihan yang segera bisa diikuti dengan kesempatan kerja atau kesempatan berwira usaha maka diharapkan makin banyak jumlah keluarga yang dapat meningkat menjadi keluarga sejahtera dalam waktu singkat. Keluarga yang mengikuti pelatihan dapat dititipkan dan bekerja pada keluarga lain yang telah mempunyai usaha. Pemberian modal secara langsung kepada keluarga muda yang baru dilatih biasanya tidak berhasil karena adanya saingan yang berat dari pengusaha yang merasa disaingi.

Di bidang pendidikan diharapkan masyarakat dapat mengikuti kegiatan PAUD dimana pendidikan anak pada usia dini mengandung makna agar kegembiraan anak akan sekolah bisa dimulai pada saat yang sangat dini. Upaya ini mendorong peningkatan kualitas pendidikan di tanah air.

Di bidang kesehatan, pengembangan budaya hidup sehat itu harus disertai dengan penyegaran dan pengembangan Posyandu yang diharapkan bisa diutamakan untuk memberi pelayanan kepada keluarga muda dengan anak-anak balitanya. Posyandu harus berperan untuk mendukung agar keluarga muda, laki perempuan, tetap sehingga bisa bekerja dengan baik dan mendapatkan nilai tambah yang tinggi sehingga bisa menjamin kehidupan yang sejahtera, terutama mendidik anak-anak balitanya sehingga bisa melepaskan diri dari lembah kemiskinan.

²⁸ Ibid

Dalam bidang lingkungan diharapkan dapat dihilangkan isolasi antara tempat pemukiman penduduk dan ketiga kebutuhan pokoknya untuk usaha, pendidikan dan kesehatan. Disamping itu lingkungan sekitar pemukiman, halaman dan sekitarnya, dapat dirombak menjadi Kebun Bergizi untuk meningkatkan gizi keluarga.

Sasaran utama pembentukan ini bukan semata-mata dengan tujuan membentuk Posdaya, tetapi dimaksudkan agar keluarga muda, keluarga lansia, kaya dan miskin bisa bersilaturahmi dan saling peduli sesamanya. Jadi sasarannya adalah bahwa Posdaya ini menjadi forum pemberdayaan keluarga muda kurang mampu dan berkembangnya suasana hidup gotong royong di kalangan masyarakat setempat.

F. Definisi Konseptual

Konsep merupakan unsur pokok dari suatu penelitian dan jika masalah dan kerangka teorinya sudah jelas biasanya sudah diketahui pula fakta mengenai gejala yang menjadi pokok perhatian dan suatu konsep sebenarnya merupakan definisi secara singkat dari kelompok fakta atau gejala tersebut.²⁹

Definisi konseptual ini dimaksudkan sebagai gambaran yang lebih segar untuk menghindari kesalahpahaman tentang pengertian atau pembatalan pengertian tentang istilah yang ada dalam pokok permasalahan. Dan definisi konseptual pada penelitian ini adalah antara lain :

²⁹ Koentjoroningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, PT. Gramedia, Jakarta, 1997, hal 21

1. Implementasi

Implementasi adalah suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

2. Kebijakan

Kebijakan adalah serangkaian program yang dilakukan pemerintah dengan tujuan mencapai tujuan bersama yang dicita-citakan.

3. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan adalah keseluruhan tindakan pelaksanaan dari kebijakan yang dilakukan baik individu, pemerintah dan swasta yang berbentuk program yang telah ditetapkan dengan menggunakan berbagai macam sumber daya dalam suatu pola yang terintegrasi untuk mencapai tujuan yang telah dicita-citakan bersama.

4. Posdaya

Posdaya adalah sebuah program pemberdayaan keluarga yang bersifat swadaya dan merupakan forum atau wadah koordinasi bagi aspek-aspek kegiatan penguatan fungsi-fungsi keluarga dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana cara mengukur variabel. Dengan kata lain, definisi operasional adalah semacam petunjuk pelaksanaan bagaimana caranya mengukur variabel penelitian.³⁰

Dan unsur-unsur implementasi program Posdaya di Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut :

1. Program Posdaya
 - a. Waktu pelaksanaan program-program Posdaya
 - b. Pelaksanaan program Posdaya di bidang kesehatan
 - c. Pelaksanaan program Posdaya di bidang pendidikan
 - d. Pelaksanaan program Posdaya di bidang ekonomi
 - e. Hasil dari program-program Posdaya
2. Indikator Keberhasilan Program Posdaya
 - a. Tingkat partisipasi masyarakat
 - b. Kontinuitas pelaksanaan kegiatan
 - c. Jumlah kegiatan yang dilaksanakan
 - d. Kelengkapan sarana kegiatan
3. Komunikasi
 - a. Komunikasi antara pemerintah daerah Kabupaten Bantul dengan aparat Desa Bangunjiwo.

³⁰Masri Singarimbun dkk , *Metode Penelitian Sosial*, LP3ES, Jakarta, 1983 hal.46

- b. Komunikasi antara pemerintah daerah Kabupaten Bantul dengan masyarakat Desa Bangunjiwo.
- c. Komunikasi antara pemerintah daerah dan aparat Desa Bangunjiwo dengan pelaksana program Posdaya di pedukuhan.
- d. Komunikasi antara pelaksana program Posdaya dengan masyarakat di pedukuhan.

4. Sumber Daya

a. Sumber Daya Anggaran (Dana)

- 1) Sumber pendanaan program Posdaya

b. Sumber Daya Manusia Desa Bangunjiwo

c. Sumber Daya Peralatan

- 1) Sarana dan prasarana program Posdaya

d. Sumber Daya Informasi dan Kewenangan

- 1) Informasi dari pemerintah daerah dan desa kepada pelaksana program Posdaya tentang pelaksanaan program.
- 2) Kewenangan pelaksana program dalam melaksanakan program Posdaya di pedukuhan.

5. Disposisi Pelaksana Program Posdaya

- a. Pemahaman pelaksana terhadap tujuan dan pelaksanaan program Posdaya.
- b. Respon pelaksana program Posdaya dan masyarakat pedukuhan terhadap program Posdaya
- c. Intensitas pelaksanaan program Posdaya

6. Struktur Birokrasi

- a. Struktur organisasi pelaksana program Posdaya
- b. Pembagian kewenangan antar pelaksana program Posdaya
- c. SOP (*standard operating procedure*) program Posdaya

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Karena penelitian ini bermaksud ingin mencermati dan menelaah lebih jauh tentang implementasi program Posdaya di Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul khususnya di Pedukuhan Lemahdadi dan Pedukuhan Gendeng.

Untuk mendapatkan kesimpulan yang objektif, penelitian kualitatif mencoba mendalami dan menerobos gejalanya yang menginterpretasikan masalahnya atau menyimpulkan kombinasi dari berbagai permasalahan sebagaimana disajikan situasinya.³¹

Adapun karena tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkap fenomena sosial dengan secara jelas dan cermat, maka metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Hadari Nawawi memberikan pengertian metode deskriptif sebagai suatu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan dan melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian (seorang,

³¹ Lexi J Moelong, *Metodologi penelitian kualitatif*, PT Remaja Rosda Karya, Bandung, 2002 Hal 3

lembaga, kelompok/masyarakat) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.³²

Penelitian deskriptif ini meliputi :

1. Penelitian yang menggambarkan karakteristik suatu masyarakat atau suatu kelompok orang tertentu
2. Penelitian yang menggambarkan penggunaan fasilitas masyarakat
3. Penelitian yang memperkirakan proporsi orang yang mempunyai pendapat, sikap atau bertingkah laku tertentu
4. Penelitian yang berusaha untuk melakukan bermacam ramalan. Apabila sebelum melaksanakan program kita ingin mengetahui beberapa persen atau berapa orang yang mendukung dan yang menentang dalam suatu lingkungan masyarakat tertentu dalam melakukan suatu penelitian atas sampel yang diambil dari masyarakat tersebut.³³

Berdasarkan pengertian dan ciri-ciri metode penelitian deskriptif diatas, maka operasionalnya berkisar pada pengumpulan data yang selanjutnya disusun, diolah, dan ditafsirkan. Selanjutnya data yang telah diolah tersebut diberi makna yang rasional dengan mematuhi prinsip-prinsip logika untuk memperoleh kesimpulan-kesimpulan yang bersifat kritis.

³² Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Gajah Mada University Press, 2011, Hal 63

³³ DR. Irawan, Soeharto. 2004. *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Hal 35

2. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh dari narasumber secara langsung baik melalui wawancara, kuisisioner atau pun dengan melakukan pengamatan secara langsung ke lapangan.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah merupakan data yang diperoleh melalui studi pustaka, literatur, artikel, foto dan lain sebagainya.

3. Unit Analisa

Unit analisis dalam penelitian ini adalah program pos pemberdayaan masyarakat (Posdaya) di Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul khususnya di Pedukuhan Gendeng dan Lemahdadi.

4. Teknik Pengumpulan data

Sesuai dengan jenis penelitian yang merupakan penelitian kualitatif deskriptif, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui tiga cara yaitu :

a. Observasi

Dalam observasi ini peneliti hanya sebagai pengamat yang hadir di lokasi. Observasi langsung ini akan dilakukan dengan cara formal dan informal untuk mengamati berbagai kegiatan dan peristiwa dalam implementasi program Posdaya

di Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul khususnya di Pedukuhan Gendeng dan Lemahdadi.

b. Wawancara mendalam (*in depth interview*)

Wawancara, yaitu suatu cara untuk mendapatkan dan mengumpulkan data melalui tanya jawab dan dialog atau diskusi dengan informan. Wawancara jenis ini bersifat lentur dan terbuka, tidak berstruktur ketat, tidak dalam suasana formal dan dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara kepada informan.

Informan dalam penelitian ini yaitu Aparat Dinas BKK, PP dan KB, Lurah Desa Bangunjiwo, ketua tim pelaksana program Posdaya di Pedukuhan Gendeng dan Lemahdadi, Pengurus program Posdaya di Pedukuhan Gendeng dan Lemahdadi, dan beberapa masyarakat Desa Bangunjiwo di Pedukuhan Gendeng dan Lemahdadi dimana wawancara dengan beberapa masyarakat dimaksudkan untuk mengetahui tanggapan dan pendapat masyarakat tentang program Posdaya. Pertanyaan yang diajukan bisa semakin terfokus sehingga informasi yang bisa dikumpulkan dengan rinci dan mendalam.

c. Dokumentasi

Dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mengkaji dokumen-dokumen baik berupa buku referensi maupun peraturan atau pasal yang berhubungan dengan penelitian ini guna melengkapi data-data yang berhubungan dengan penelitian ini, serta cara pengumpulan data dan telaah pustaka, dimana dokumen-dokumen yang dianggap menunjang dan relevan dengan permasalahan yang akan diteliti baik berupa buku-buku, literatur, dokumen dan arsip yang ada

di lembaga-lembaga yang terkait dipelajari, dikaji dan disusun/dikategorikan sedemikian rupa, sehingga dapat diperoleh data guna memberikan informasi berkenaan dengan penelitian yang akan dilakukan.

5. Teknik analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis interaktif dari Milles dan Huberman. Dalam teknik ini ketiga komponen utama yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan yang dilakukan serentak dengan proses pengumpulan data, dalam bentuk siklus selama proses penelitian. Untuk lebih jelasnya ketiga komponen dalam model analisa interaktif dari Milles dan Huberman dapat dijelaskan dibawah ini yaitu :

a. Reduksi data (Pengumpulan Data)

Merupakan proses seleksi dan penyederhanaan data yang diperoleh dilapangan, teknik ini digunakan agar data dapat digunakan sepraktis dan seefisien mungkin, sehingga hanya data yang diperlukan dan dinilai valid yang dijadikan sumber penelitian.

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Merupakan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan.

c. *Conclusion Drawing* (Penarikan Kesimpulan)

Dari awal pengumpulan data peneliti harus sudah mulai mengerti apa arti dari hal-hal yang ditemui. Dari data yang diperoleh di lapangan maka dapat diambil kesimpulan hasil akhir penelitian tersebut.³⁴

³⁴ Sutopo H.B, *Penelitian Kualitatif*, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2002